

BAB VI

SARAN

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Bidang Sumber Daya Kesehatan Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dapat diberikan saran:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, calon apoteker diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan, undang-undang farmasi dan segala hal yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
2. Calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI, 2012, *Peraturan Kepala BPOM nomor HK.03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2016, <http://ik.pom.go.id/v2016/artikel/artikel-Hidrokinon-dalam-Kosmetik.pdf>, diakses 16 Februari 2021.
- BPOM RI, 2016, *Peraturan Kepala badan Pengawasan Obat dan makanan nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat Dan Makanan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2018, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 4 tahun 2018 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Obat Tradisional*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, <https://www.pom.go.id/new/view/more/artikel/14/Apa-itu-Boraks-.html>, diakses 18 Februari 2021
- BPOM RI, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/139/BAHAN-BERBAHAYA-YANG->, diakses 18 Februari 2021
- BPOM RI., 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 tentang Penarikan dan Pemusnahan Obat yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan*,

Khasiat, Mutu, dan Label, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.

Depkes RI, 1996, *Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Depkes RI, 1997, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika*. Departemen Kesehatan Republik Indonesia; Jakarta

Depkes RI, 2009, *Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Departemen Kesehatan RI: Jakarta.

Gubernur Jatim, 2016, *Peraturan Gubernur No 74 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

<https://p2t.jatimprov.go.id/>, diakses 17 Februari 2021

<https://ssw.surabaya.go.id/>, diakses 17 Februari 2021

<https://standarpangan.pom.go.id/berita/bahan-tambahan-yang-dilarang-digunakan-dalam-produk-pangan>, diakses 18 Februari 2021

Kemenkes RI, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kemenkes RI, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kemenkes RI, 2010, *Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Kemenkes RI, 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan No 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Kemenkes RI, 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan nomor 004 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2012, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2018, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2020, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2020*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kemenkes RI, 2020, *Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan Penggolongan Narkotika No. 22*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kemenkes RI,, 2017, *Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga*, Jakarta.
- Kemenkes RI,, 2019, *Pedoman Ketentuan Ekspor dan Impor Alat Kesehatan*, Jakarta.
- Presiden RI, 2004, *Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta
- Presiden RI, 2009, *Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta

- Presiden RI, 2009, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2009, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.
- Presiden RI, 2012, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan*, Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta.